

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Tanjung et al., (2024) dalam *Journal of Economic, Business and Accounting* yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Pegawai Honorer terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga di Kota Sukabumi”. Studi ini menganalisis bahwa pengaruh pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga pegawai honorer. Hasil ini menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, sementara pendapatan tidak selalu memberikan dampak langsung apabila pengeluaran rumah tangga tinggi. Penelitian oleh Purwaningsih (2021) dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Udayana* yang berjudul “Pengaruh Status Pekerjaan, Kesehatan, dan Jumlah Tanggungan Keluarga terhadap Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga di Kota Denpasar”. Studi ini meneliti pengaruh jumlah tanggungan keluarga, status pekerjaan, dan kesehatan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rumah tangga yang merupakan indikator penting kesejahteraan ekonomi. Penelitian oleh Ilmiah et al., (2025) dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unud* yang berjudul “Analisis Pendapatan Pekerja Migran pada Industri Kerajinan Genteng Pejaten Kabupaten Tabanan”. Studi ini menganalisis pengaruh karakteristik pekerja, termasuk jumlah tanggungan, terhadap pendapatan dan kondisi ekonomi pekerja industri informal. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga berpengaruh signifikan terhadap pendapatan dan kesejahteraan pekerja karena mendorong peningkatan jam kerja dan produktivitas. Penelitian oleh Laksono (2022) dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* yang berjudul “Pengaruh Upah, Umur, Pendapatan dan Tanggungan Keluarga terhadap Curahan Jam Kerja Buruh Wanita Menikah di IKM Alas Kaki Kabupaten Mojokerto”. Studi ini menganalisis pengaruh upah, usia, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap curahan jam kerja buruh. Hasil studi menunjukkan bahwa jumlah tanggungan keluarga terbukti signifikan dalam meningkatkan jam kerja yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan ekonomi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Produktivitas

Produktivitas secara teori diartikan sebagai perbandingan antara output (barang dan jasa) dengan input (tenaga kerja, bahan dan uang). Produktivitas yang

rendah merupakan pencerminan dari organisasi/perusahaan yang memboroskan sumber daya yang dimilikinya. Dan ini berarti bahwa pada akhirnya perusahaan tersebut kehilangan daya saing dan dengan demikian akan mengurangi skala aktivitas usahanya. Produktivitas yang rendah dari banyak organisasi/perusahaan akan menurunkan pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa secara menyeluruh (Hasibuan, 2011). Dalam perspektif teori manajemen dan ekonomi, produktivitas mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau individu dalam memanfaatkan sumber daya secara optimal. Produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa sumber daya digunakan secara efisien, sedangkan produktivitas yang rendah mengindikasikan adanya pemborosan sumber daya, lemahnya manajemen, atau rendahnya kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu, produktivitas sering dijadikan indikator kinerja baik pada tingkat individu, perusahaan, maupun sektor industri.

Tenaga kerja yang memiliki keterampilan memadai, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan yang baik cenderung menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, kondisi kerja yang tidak aman dan minim perlindungan dapat menurunkan produktivitas serta meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Secara makro, produktivitas memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan daya saing industri, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Sedangkan, produktivitas yang rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar kesenjangan kesejahteraan, khususnya bagi pekerja sektor informal seperti pekerja bangunan.

2.2.2 Grand Teory

Grand theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian di rumuskan pada level selanjutnya. Teori ini bersifat umum dan abstrak, sehingga dapat diterapkan pada berbagai hal penelitian. Dalam penelitian ilmiah, grand teori berperan penting sebagai landasan berpikir peneliti dalam merumuskan masalah, menentukan variabel penelitian, serta menyusun hipotesis dan metode analisis. Grand teori juga membantu peneliti dalam menafsirkan hasil penelitian agar tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi memiliki dasar teoritis yang kuat dan terhubung dengan kajian ilmiah yang lebih luas. Dalam penelitian kesejahteraan pekerja bangunan, grand teori digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara kondisi sosial ekonomi, perlindungan tenaga kerja, dan tingkat kesejahteraan pekerja. Melalui grand teori, dapat dipahami bahwa kualitas tenaga kerja, produktivitas, serta perlindungan kerja merupakan faktor penting yang

memengaruhi kesejahteraan, baik dari aspek ekonomi maupun sosial, sehingga penelitian ini memiliki relevansi teoritis dan praktis.

2.2.3 Teori Work–Leisure Choice (Pilihan Jam Kerja)

Labor Leisure Choice adalah pilihan dari individu untuk menggunakan waktunya bekerja atau tidak bekerja (leisure). Setiap jam yang digunakan untuk leisure akan mengurangi waktu untuk bekerja, jadi semakin tinggi tingkat upah maka semakin berharga leisure. Teori Work–Leisure Choice menjelaskan bahwa individu dihadapkan pada pilihan antara waktu bekerja (work) dan waktu luang (leisure) untuk memaksimalkan tingkat kepuasan atau utilitas hidupnya. Dalam teori ini, bekerja menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara waktu luang memberikan manfaat non-ekonomi seperti istirahat, kesehatan, dan kebersamaan dengan keluarga. Keputusan individu dalam menentukan jam kerja dipengaruhi oleh tingkat upah, kebutuhan ekonomi, kondisi kerja, serta preferensi terhadap waktu luang.

Pada pekerja bangunan di Kota Tangerang, teori *Work Leisure Choice* sangat sesuai karena sebagian besar pekerja bangunan, khususnya pekerja non-skill, menghadapi keterbatasan pilihan jam kerja. Sistem kerja harian dan ketidakpastian proyek membuat pekerja bangunan cenderung bekerja dalam jam yang panjang ketika pekerjaan tersedia, guna memaksimalkan pendapatan. Kondisi ini sering kali mengurangi waktu luang, meningkatkan kelelahan fisik, serta berdampak pada kesehatan dan kehidupan sosial pekerja, yang pada akhirnya memengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, teori Work–Leisure Choice membantu menjelaskan bahwa kesejahteraan pekerja bangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh keseimbangan antara jam kerja dan waktu luang.

Ketika pekerja bangunan terpaksa mengorbankan waktu istirahat dan kehidupan sosial demi memenuhi kebutuhan ekonomi, kesejahteraan yang dicapai cenderung bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, analisis kesejahteraan pekerja bangunan di Kota Tangerang perlu mempertimbangkan aspek jam kerja, kondisi kerja, dan kesempatan memperoleh waktu luang sebagai bagian penting dalam menilai kualitas hidup pekerja secara baik.

Selain itu, rehat memiliki “harga” dan harga rehat adalah opportunity cost. Harga rehat sama dengan harga dari bekerja yang dinyatakan sebagai upah, dan upah menggambarkan pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu, besarnya opportunity cost rehat sama dengan upah yang diperoleh jika bekerja. Oleh karena harga rehat

sama dengan upah maka pekerja akan memilih (preferensi) apakah akan memperbanyak waktu untuk bekerja atau waktu untuk rehat. Pilihan ini tergantung pada pandangan pekerja apakah rehat merupakan “barang normal” (normal goods) atau “barang inferior” (inferior goods). Hubungan antara tingkat upah, jam kerja, dan pendapatan akan dijelaskan pada kurva indifferen.

2.2.4 Teori Pola Konsumsi

Menurut Prasetyo (2009), teori Duesenberry menyebutkan bahwa pengeluaran secara berkala mempengaruhi pola konsumsi rumah tangga. Irreversible dalam pengeluaran konsumsi ialah apabila terdapat pengeluaran hendak naik saat pemasukkan naik, begitu pula sebaliknya. Menurut Mangkoesubroto (2008) dalam Hanum (2018), pola pengeluaran penduduk didasarkan oleh pernyataan pola penerimaan serta pola pengeluaran konsumsi sesuatu orang atau seorang pada biasanya di pengaruhi oleh masa serta siklus kehidupan. Pengeluaran konsumsi terbelah menjadi dua golongan, yaitu konsumsi pangan dan konsumsi non pangan.

Segala bentuk bahan pangan seperti, beras, minyak, sayur-mayur, ikan, daging serta lain-lain, merupakan konsumsi pangan. Sebaliknya konsumsi non pangan berbentuk pembelajaran, transportasi, kesehatan, baju, beberapa barang tahan lama, serta asuransi (BPS, 2020). Pola konsumsi yakni informasi yang membagikan cerminan tipe serta jumlah makanan seseorang dalam penduduk tertentu. Pola konsumsi rumah tangga ialah suatu penanda kesejahteraan dalam keluarga. Besar kecilnya dalam sesuatu pengeluaran konsumsi bisa membagikan kesejahteraan suatu penduduk. Semakin besar tingkatan pemasukan yang di peroleh rumah tangga maka semakin kecil pengeluaran makanan dalam segala pengeluaran dalam rumah tangga (Cahyono, 2003) dalam Tamawiwi (2015).

2.2.5 Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan bukanlah hal yang baru, baik dalam wacana global maupun nasional. Dalam membahas analisis tingkat kesejahteraan, tentu kita harus mengetahui pengertian sejahtera terlebih dahulu. Kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Menurut Undang-Undang No 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dari Undang-Undang di atas dapat kita cermati bahwa ukuran tingkat kesejahteraan dapat dinilai dari kemampuan seorang individu atau kelompok dalam usahanya memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Kebutuhan material dapat kita hubungkan dengan pendapatan yang

nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual kita hubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentraman hidup.

Kesejahteraan pekerja bangunan adalah aspek penting dalam memastikan kualitas hidup pekerja di sektor konstruksi, yang sering kali terabaikan meskipun mereka memiliki peran vital dalam pembangunan infrastruktur. Di Kota Tangerang, yang terus berkembang pesat dengan berbagai proyek pembangunan, pekerja bangunan menjadi elemen utama yang mendukung keberlanjutan pembangunan tersebut. Namun, kondisi kesejahteraan mereka sering kali tidak mencerminkan kontribusi besar yang mereka berikan dalam pembangunan kota ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi kesejahteraan pekerja bangunan di Tangerang, dengan fokus pada variabel-variabel yang dianggap krusial dalam kehidupan pekerja, yaitu upah, jumlah tanggungan keluarga, pengeluaran rumah tangga, status kepemilikan rumah, jumlah hari kerja dalam sebulan, akses kesehatan, dan jarak tempat kerja dengan tempat tinggal.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan antara variabel-variabel tersebut dan kesejahteraan pekerja bangunan. Kerangka pikir penelitian ini mengasumsikan bahwa kesejahteraan pekerja tidak hanya bergantung pada upah yang diterima, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi lainnya yang terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka.

2.2.6 Penentuan Upah

Upah adalah suatu penerimaan sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan yang telah dan akan dilakukan, dinyatakan. Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja profesional seperti pegawai, pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan. Pembayaran itu biasanya sebulan sekali. Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang kasar yang pekerjaannya selalu berpindah-pindah seperti, pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh, yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan

bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan

Menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2003 tentang Dasar dan Wewenang Penetapan Upah Minimum yaitu: a

- a. Penetapan upah didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan Ekonomi.
- b. Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada pencapaian KHL.
- c. Pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perbandingan besarnya upah minimum terhadap nilai KHL pada periode yang sama.
- d. Untuk pencapaian KHL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur menetapkan tahapan pencapaian KHL dalam bentuk peta jalan pencapaian KHL bagi perusahaan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan dunia usaha

Dimana pada dasarnya upah merupakan sumber utama penghasilan. Oleh sebab itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup karyawan dan keluarganya dengan wajar. Kewajaran upah dinilai dari sudut kebutuhan hidup minimum (Simanjuntak, 1998). Penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup pekerja, diharapkan agar pendapatan pekerja cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Ini sesuai dengan standar internasional bahwa upah minimum yang ditetapkan harus mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum (DPS, 2003). Untuk Indonesia, kebijakan penetapan Upah Minimum Regional (UMR) beserta peningkatannya setiap periode merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menyebabkan terjadinya keseimbangan untuk dapat bergerak naik. Jika mekanisme pasar dibiarkan bekerja dengan sendirinya tanpa intervensi pemerintah, menyebabkan kecelakaan upah maka akan sesuai dengan kemampuan pasar.

2.2.7 Status Kepemilikan Rumah

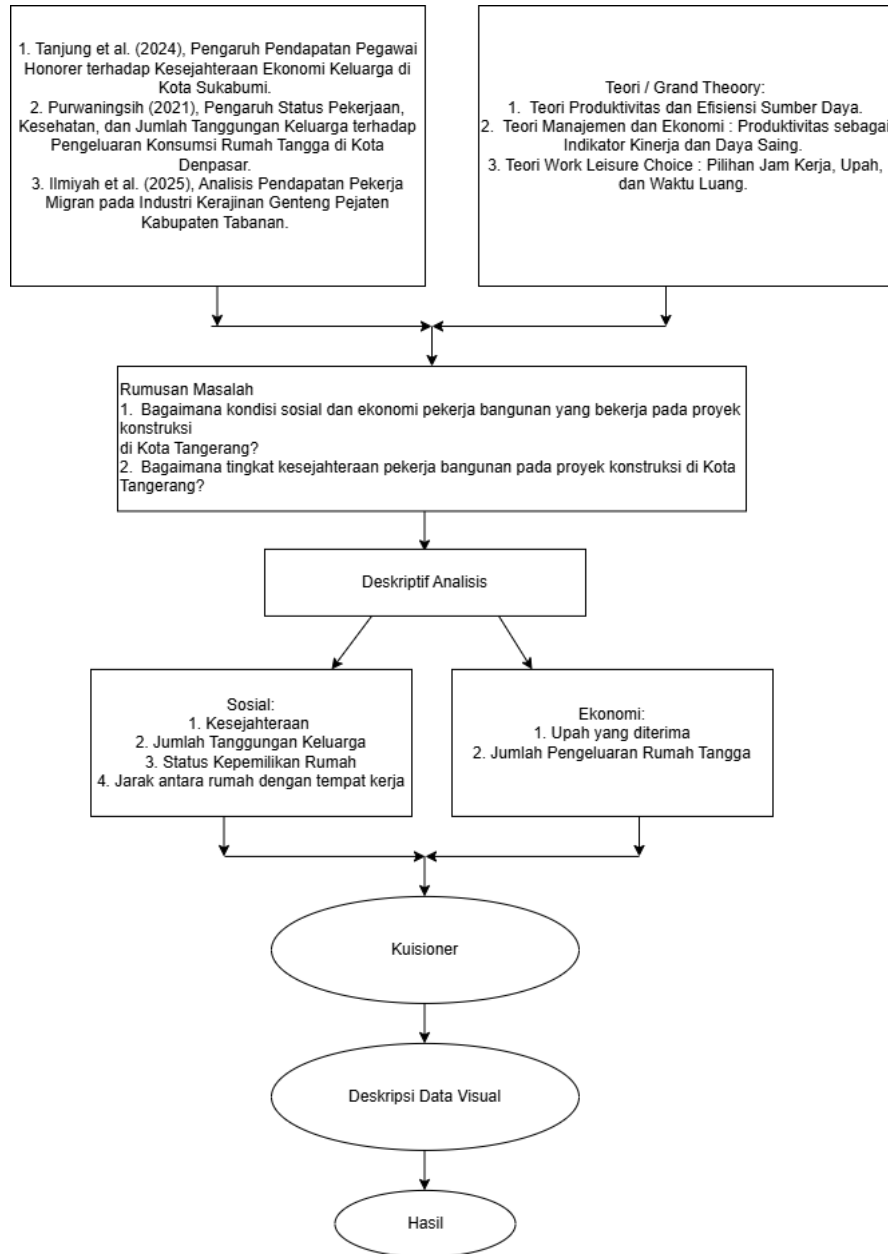
Status kepemilikan rumah berfungsi sebagai indikator stabilitas finansial dan rasa aman bagi pekerja di bidang konstruksi. Dengan memiliki rumah sendiri, pekerja dapat merasakan keamanan karena tidak perlu membayar sewa setiap bulan, yang dapat mengurangi tekanan ekonomi. Di sisi lain, pekerja yang hanya menyewa atau tinggal di tempat yang tidak tetap

mungkin merasa kurang stabil, yang dapat berdampak negatif pada kualitas hidup dan kesejahteraan mereka. Penelitian ini berhipotesis bahwa pekerja yang memiliki rumah sendiri akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja yang tinggal di rumah sewa atau kontrakan.

2.2.8 Pendapatan

Menurut Ramlan (2006), pemasukan dipecah menjadi dua tipe, ialah pemasukan bersih dan pemasukan total. Pemasukan bersih merupakan pemasukan yang dipotong dari pembuatan. Menurut Sukirno (2006), dalam penafsiran ekonomi, pemasukan merupakan imbalan atas pemakaian faktor-faktor pembuatan yang dipunyai oleh zona rumah tangga serta zona korporasi, berbentuk upah/industri, sewa, bunga, serta laba/laba. Dikutip melalui Fadillah (2014) bahwa seberapa besar pengeluaran konsumsi dan kesejahteraan rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan. Lalu, Soekartawi (2007) mengemukakan bahwa kuantitas serta kualitas barang/jasa yang dikonsumsi meningkat setara dengan peningkatan pendapatan. Misalnya, sebelum pendapatan meningkat, kualitas makanan yang dikonsumsi buruk dan kualitasnya lebih baik.

2.3 Alur Berpikir



Sumber : Tanjung et Al diolah, 2025
Gambar 2.1 Alur Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesejahteraan pekerja bangunan yang bekerja pada proyek konstruksi di Kota Tangerang, ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi. Kerangka pemikiran penelitian disusun berdasarkan kajian empiris dari penelitian terdahulu serta landasan teori yang relevan.

Penelitian terdahulu yang digunakan menunjukkan bahwa kesejahteraan pekerja, khususnya pekerja sektor informal seperti pekerja bangunan, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial, seperti tingkat upah, pengeluaran rumah tangga, status pekerjaan, serta kondisi keluarga. Studi-studi sebelumnya juga menegaskan bahwa pekerja bangunan cenderung menghadapi ketidakpastian pendapatan dan keterbatasan jaminan sosial, yang berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan mereka.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi teori produktivitas dan efisiensi sumber daya, teori manajemen ekonomi, serta teori work leisure choice. Teori produktivitas dan efisiensi sumber daya menjelaskan bahwa tingkat kesejahteraan pekerja berkaitan dengan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang optimal. Teori manajemen ekonomi menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga dalam menentukan kesejahteraan, sedangkan teori work leisure choice menjelaskan hubungan antara jam kerja, upah, dan waktu luang terhadap keputusan ekonomi pekerja.

Berdasarkan kajian tersebut, dirumuskan dua rumusan masalah utama, yaitu:

1. Bagaimana kondisi sosial dan ekonomi pekerja bangunan yang bekerja pada proyek konstruksi di Kota Tangerang ?
2. Bagaimana tingkat kesejahteraan pekerja bangunan di Kota Tangerang ?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Analisis difokuskan pada dua dimensi utama, yaitu dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Dimensi sosial meliputi indikator kesejahteraan, jumlah tanggungan keluarga, status kepemilikan rumah, serta jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja. Sementara itu, dimensi ekonomi meliputi indikator upah yang diterima serta jumlah pengeluaran rumah tangga.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pekerja bangunan yang bekerja pada proyek konstruksi di Kota Tangerang. Data yang terkumpul kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi data visual, seperti tabel dan

202010180311156
Fero Fahrani Beby Cekar Purba
Ekonomi Pembangunan

grafik, untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi sosial dan ekonomi responden.

Hasil dari analisis deskriptif tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat kesejahteraan pekerja bangunan di Kota Tangerang serta menjadi dasar dalam menarik kesimpulan dan rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja bangunan.

